

## **SINERGI INFORMASI PEMERINTAH MELALUI KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI VIRUS COVID-19 DI INDONESIA**

**Imaddudin<sup>1)</sup>, Annisa Eka Syafrina<sup>2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: imaddudin@dsn.uharajaya.ac.id

### **Abstrak**

Penanganan virus pandemi COVID-19, yang terjadi bila diperlukan sinergi antara informasi pemerintah pusat dan daerah melalui komunikasi publik yang efektif dan tepat guna dengan rencana strategis sebagai pedoman komunikasi akan diterapkan di semua elemen. Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui sinergi informasi pemerintah melalui komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan analisis terhadap isi informasi yang tersebar di media publikasi. Hasil penelitian menunjukkan sinergi informasi pemerintah pusat dan daerah melalui komunikasi publik perlu dibarengi dengan keterampilan komunikasi yang memiliki peran dan fungsi secara sistematis, masif dan terstruktur berdasarkan rencana strategis sebagai dasar strategi komunikasi publik yang akan diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Komunikasi publik sebagai sarana untuk mensinergikan informasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu dibarengi dengan analisis permasalahan yang terjadi di beberapa contoh negara lain yang terkena dampak sebagai bahan kajian pemecahan masalah. Selain itu, dokumen dengan arah yang jelas sebagai petunjuk teknis baik kesehatan maupun non kesehatan dalam percepatan penanganan. Sistem birokrasi yang dinamis serta pesan optimisme dan positif dalam membangun kepercayaan publik, sehingga penanganan pandemi ini akan lebih cepat dan komprehensif.

**Kata Kunci:** Sinergi Informasi, Pemerintah Indonesia, Komunikasi Publik, Pandemi COVID-19

### **Abstract**

*The handling of the COVID-19 pandemic virus that occurs when necessary synergies between central and local government information through effective and appropriate public communication with a strategic plan as a communication guideline will be applied in all elements. The purpose of the assessment is to find out the synergy of government information through public communication in handling the Covid-19 pandemic in Indonesia. Research with a qualitative approach through observation and analysis of the content of information scattered in publication media. The results show the synergy of central and local government information through public communication needs to be included with communication skills that have roles and functions systematically, massively and structured based on strategic plans as a basis for public communication strategies to be applied by the central government and the government in handling the COVID-19 pandemic. Public communication as a way to synergize information between central and regional government policies needs to be accompanied by an analysis of the issues that occur in several examples of other affected countries as material for problem solving studies. In addition, documents with clear direction as a technical lead both health and non-health in the acceleration of handling. A dynamic bureaucratic system as well as messages*

*of optimism and positivity in building public trust, so that the handling of this pandemic will be faster and more comprehensive.*

**Keywords:** *Information synergy, Indonesia Government, Public Communication, Pandemic COVID-19*

*Correspondence author: Imaddudin, imaddudin@dsn.uharajaya.ac.id, Bekasi, Indonesia*



## PENDAHULUAN

Memahami krisis yang berpotensi mengubah pandangan pemangku kepentingan dan juga dapat merusak kepercayaan publik. Sehingga pihak yang menerima informasi akan kebal terhadap informasi dan dapat berdampak pada salah paham, ketidaktahuan bahkan pelanggaran. Upaya menyelaraskan kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada publik selama krisis ini menjadi sorotan.

Bagaimana bisa implementasi kebijakan jika tidak ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengkomunikasikan pesan penanganan pandemi COVID-19. secara tuntas melalui komunikasi publik yang baik.

Pengelolaan komunikasi publik oleh pemerintah sebenarnya telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik. Inpres ini dibuat dalam rangka mendukung keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi masyarakat, dan mempercepat penyampaian informasi kebijakan dan program pemerintah. Salah satu amanatnya adalah menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas, berwawasan kebangsaan, dan mudah dipahami terkait kebijakan dan program pemerintah (Ramadani T, 2019).

Menyinggung krisis saat ini yaitu virus COVID-19, bukan sekedar penyampaian retorika atau penjelasan angka dalam data statistik penyebaran virus COVID-19 di negeri ini. Melainkan solusi penanganan yang disampaikan kepada warga secara cepat dan tepat. Komunikasi kepada publik, baik yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, didasarkan pada keberpihakan bersama dalam menyelesaikan masalah ini tanpa terbawa oleh kepentingan sepihak.

Keputusan yang telah diambil akan menjadi sorotan jika tidak saling berimbang bahkan terjadinya ketidakseimbangan kebijakan. Informasi yang dikomunikasikan harus mendapatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga informasi dan kebijakan yang dikomunikasikan lebih efisien, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masing-masing daerah.

Penanganan krisis melalui komunikasi publik yang efektif dapat mengurangi dampak negatif dengan mencegah krisis berkepanjangan dan segera mengakhiri pandemi COVID-19 secara keseluruhan. Sistem birokrasi yang harus dinamis mengikuti perkembangan, pesan-pesan inovatif dan motivasional yang terus ditingkatkan melalui narasi-narasi yang dapat membangun kepercayaan publik, bahkan bukan soal membentuk kepercayaan tetapi dapat membangun dan mengimplementasikan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan harapan dan tujuan.

Indonesia bukanlah negara pertama yang terjangkit virus COVID-19, sudah banyak contoh yang dialami negara lain, baik dari pencegahan melalui kebijakan maupun tindakan yang berhasil atau tidak. Serta inovasi-inovasi yang terus diupayakan oleh sejumlah negara di dunia. Bahkan jauh sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 2 April 2020 oleh Presiden Joko Widodo saat itu (Wangsemukti, D. G., & Nasrullah, N, 2021). Kampanye pencegahan di dalam negeri dinilai masih sangat minim, informasi pencegahan atau penyiapan alat pelindung diri berupa masker belum disiapkan secara maksimal. Sedangkan virus COVID-19 tidak lagi mewabah namun sudah menjadi pandemi yang terus menghantui kita setiap hari hingga saat ini,

dengan informasi angka positif terus bertambah, belum lagi yang meninggal akibat virus ini terus bertambah menjadi momok yang menakutkan.

Perlindungan tenaga medis sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan langsung korban virus COVID-19 yang belum lengkap seperti APD (Alat Pelindung Diri), selain itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). kebijakan yang diterapkan sejumlah daerah tampaknya tidak dilaksanakan secara bersamaan. Padahal Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jangkauan yang sangat luas, harus segera ditangani dengan cepat dalam *hacking* agar tidak terus bertambahnya kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah, seiring dengan larangan mudik yang hanya disosialisasikan. belakangan ini, padahal sebelumnya pemerintah hanya menghimbau untuk mudik, dan banyak hal lainnya. Ketidakpastian informasi hari ini dan esok kepada publik telah menimbulkan kesalahpahaman bahkan muncul permasalahan baru, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prototipe (tahapan) penanganan pencegahan dan penyelesaian pandemi COVID-19 yang dikomunikasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Media informasi yang menyoroti krisis ini menyampaikan pandangan dari berbagai kebijakan, hal inilah yang akan tidak sejalan dengan pemahaman dan bahkan implementasi dalam mencegah pandemi virus COVID-19.

Apakah komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia belum bisa bersinergi sehingga kebijakan yang berubah malah berbeda di sejumlah daerah. Sedangkan sinergi informasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tolak ukur keberhasilan membangun kepercayaan masyarakat bahkan menerapkan perilaku di masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menyelesaikan krisis ini agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan, perbedaan pandangan, kebijakan yang tidak lengkap. dan penyelesaian masalah yang lambat.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian mencakup beberapa bagian yaitu jenis penelitian dalam upaya menemukan formula mengenai bagaimana sinergi informasi pemerintah melalui komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan pendekatan penelitian secara kualitatif agar bisa mendalami analisis mengenai komunikasi publik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut David Williams (1995) dalam buku Lexy Moleong yang menyatakan “Bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam setting yang alamiah, dengan menggunakan metode-metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang secara alamiah berkepentingan” (Moleong, 2007: 5).

Metode penelitian adalah dengan menganalisis konten publikasi media informasi yang menginformasikan segala bentuk komunikasi dan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Adapun pengumpulan data dan analisis data melalui pengumpulan informasi yang sudah berlangsung di segala media dengan pendekatan pada analisis isi sebagai teknik penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai ciri khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:20). Data yang diolah dan dianalisis digunakan sebagai bahan penelitian terkait sinergi informasi pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian berupa analisis dari awal kemunculan Virus Corona pertama kali di Kota Wuhan, China hingga Indonesia, melalui observasi dan analisis yang dilakukan peneliti dengan menelaah informasi yang tersebar di media informasi dan disampaikan oleh pemerintah. baik pusat maupun daerah terkait penanganan virus corona COVID-19.

Kita tahu bahwa Penyakit Virus Corona atau disebut COVID-19 muncul tanpa direncanakan dan dengan cepat menyebar merata ke hampir seluruh daratan di muka bumi ini, jenis virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China ini mulai ramai diperbincangkan sejak

akhir tahun 2019 ini. Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan temuan kasus pertama COVID-19 di Indonesia.

Banyaknya kasus positif COVID-19 telah menjadi pandemi di hampir seluruh pelosok tanah air, termasuk beberapa pejabat negara bagian dan daerah yang terkena dampak ganasnya virus ini tanpa memandang status dan jabatannya. Namun ini bukan soal jumlah kasus positif COVID-19, bukan hanya krisis kesehatan tetapi krisis lain yang terkena dampak COVID-19 antara lain krisis ekonomi, sosial, hukum, psikologis, dan sebagainya.

### **1. Mengendalikan Sinergi**

Pengumuman kasus positif COVID-19 di Indonesia dilakukan Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di teras Istana Merdeka. Dua warga negara Indonesia (WNI) positif COVID-19 yang berdomisili di Depok memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang dinyatakan positif setelah pulang dari Indonesia. Namun, pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia itu tidak mendapat pemberitahuan bahwa dirinya dinyatakan positif COVID-19. Pasien baru mengetahui informasi tersebut melalui pengumuman resmi Presiden di Istana Negara yang dikonfirmasi oleh dokter yang merujuknya ke RSPI Sulianti Saroso. Sebelumnya, kedua pasien yang memiliki hubungan ibu-anak ini hanya mendapat diagnosis Typhus dan Pneumonic Bronchitis.

Terkait pengumuman resmi Presiden tersebut, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Negara menyatakan komitmennya untuk menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menunjukkan beberapa regulasi terkait Virus Corona (COVID-19 merupakan virus endemik, dan perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam komunikasi risiko dalam pencegahan virus melalui praktik hidup sehat, perilaku dan antisipasi penularan, serta kesiapsiagaan deteksi di semua jalur masuk, negara, serta menambah fasilitas kesehatan, laboratorium dan material logistik kesehatan, serta terus melakukan koordinasi antar sektor dalam efektivitas dan efisiensi penanganan virus corona COVID-19. Selain itu, pembiayaan pencegahan juga dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan. Biaya berupa pengobatan untuk kasus suspek yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit menular tertentu yang baru muncul, ([indonesia.go.id/indonesia-in-numbers](http://indonesia.go.id/indonesia-in-numbers)).

Namun, informasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum bersinergi dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan yang belum selaras antar daerah. Misalnya, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kota Solo dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 pada 13 Maret 2020 setelah salah satu warganya meninggal dunia akibat virus COVID-19. Setelah KLB dideklarasikan, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan beberapa kebijakan antara lain: menutup sekolah selama 14 hari, meniadakan Car Free Day (CFD) dan meniadakan pertunjukan Sriwedari dan Ketoprak Wayang Orang. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah pada 26 Maret 2020 namun tetap membuka akses bandara, pelabuhan, dan logistik. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Provinsi Papua yang pada 26 Maret 2020 menutup akses penerbangan dan pelayaran penumpang di wilayahnya. Berbeda lagi di Tegal, Pemkot menerapkan *lockdown* lokal pada 30 Maret 2020 dan menutup 35 ruas jalan di wilayahnya, serta beberapa kebijakan lain yang berbeda-beda di setiap daerah.

Minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat Pemerintah Daerah bertindak dan mengambil keputusan masing-masing dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Hal ini tentunya akan menyulitkan pemerintah pusat untuk memutuskan dan berkoordinasi secara linier karena adanya perbedaan kebijakan tersebut.

## 2. Program Strategis

Pada awalnya, fokus pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 lebih menekankan pada aspek ekonomi. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman. Yang Membahayakan Stabilitas Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan.

Lebih lanjut, Pemerintah menerapkan empat strategi yang secara konsisten dilakukan antara lain kampanye penggunaan masker saat berada di luar rumah, *contact tracing* menggunakan Rapid Test, edukasi dan persiapan isolasi mandiri, dan isolasi rumah sakit.

Namun, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara signifikan. Sehingga pada 10 April 2020, Pemerintah secara resmi mulai menetapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi kebijakan PPKM (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) terbaru yang dimulai pada 3 Juli 2021. Meski sulit untuk mulai menerapkannya, kebijakannya tidak berbenturan dengan seluruh pelosok tanah air.

Saat ini, Pemerintah menekankan dua hal dalam penanganan COVID-19 di sisi hulu dan hilir, yakni penguatan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di lapangan dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM). percepatan program vaksinasi nasional. Dalam upaya tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta adanya sinergi antara empat pilar, yakni unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Sinergi informasi dari pemerintah pusat harus mampu menyampaikan pesan kepada publik yang sejalan dengan tujuan yang sejalan dengan harapan bersama.

## 3. Komunikasi Publik

Semua informasi dan kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, bukan tugas dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah untuk bersentuhan langsung dan erat. warganya, baik yang terkena maupun tidak. Penyampaian pesan penanganan tersebut memerlukan protokol yang jelas dan terstruktur dalam mencapai harapan dan tujuan. Protokol Komunikasi Publik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan Virus Corona COVID-19, meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

### A. Kegiatan Komunikasi Pemerintah Pusat

1. Bentuk Tim Komunikasi.
2. Menunjuk Juru Bicara Kementerian Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan berurusan dengan media.
3. Buat pusat media.
4. Buat *website* sebagai referensi informasi utama.
5. Secara teratur mengirimkan data harian nasional melalui konferensi pers (hanya dilakukan oleh Juru Bicara COVID-19), rilis dan pembaruan di situs web:
  - a. Sebuah. Jumlah dan distribusi, Orang Berisiko (ODR).
  - b. Jumlah dan Distribusi, Orang Dalam Pemantauan (ODP).
  - c. Sebuah. Jumlah dan Distribusi, Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
  - d. Jumlah dan sebarannya, pasien yang sudah dinyatakan sehat.
  - e. Jumlah dan distribusi spesimen yang diambil.
  - f. Jumlah dan distribusi, hasil uji laboratorium terhadap spesimen.
6. Membuat produk komunikasi dan menyebarkan Informasi lainnya tentang:
  - a. sebuah. Penjelasan dasar tentang apa itu COVID-19
  - b. Penjelasan tentang pencegahan wabah COVID-19.
  - c. Penanganan protokol dari Orang Dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat.
  - d. Kriteria Pasien Dalam Pengawasan.
  - e. Tindakan pada Pasien Dalam Pengawasan.
  - f. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang bisa dilakukan di rumah.
  - g. Kriteria Orang dalam Pemantauan.

- h. Protokol untuk menangani orang yang masuk dari negara berisiko dan kontrol perbatasan.
- i. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
- j. Protokol komunikasi sekolah.
- k. Logistik dan kesiapan makanan.
- l. 132 RS rujukan penanganan COVID-19.
- m. Penjelasan pemeriksaan kesehatan dan biaya yang dikenakan.
- n. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit.
- o. Penjelasan rinci tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat: 119.
- p. Penjelasan *hoax* dan disinformasi yang terjadi

## **B. Kegiatan Komunikasi Pemerintah Daerah**

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Wilayah.
2. Menunjuk Juru Bicara Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan berurusan dengan media.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan hanya disampaikan oleh Juru Bicara COVID-19 Pemerintah Daerah:
  - a. Sebuah. Jumlah dan distribusi, People at Risk (ODR) khusus di daerah.
  - b. Jumlah dan sebarannya, Orang Dalam Pengawasan (ODP) khusus di daerah.
  - c. Jumlah dan sebarannya, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah.
  - d. Jumlah dan sebaran pasien yang telah dinyatakan sehat khusus di wilayahnya.
  - e. Jumlah dan sebaran spesimen yang diambil secara khusus di daerah tersebut.
  - f. Jumlah dan sebaran, hasil uji laboratorium terhadap spesimen tertentu di daerah tersebut.
  - g. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik
4. Juru bicara tingkat Provinsi dapat mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas pada tingkat provinsi yang bersangkutan.
5. Juru bicara tingkat kabupaten/kota dapat mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika) untuk disebarluaskan di daerahnya masing-masing
7. Seluruh pimpinan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota didorong untuk menyebarluaskan informasi tersebut pada angka 6 di atas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan dipandu oleh Dinas Kesehatan setempat, dan menggunakan narasi yang telah disusun di website rujukan Kementerian Kesehatan.
8. Pemerintah daerah dapat membuat produk komunikasi sesuai dengan data dan kebutuhan daerahnya masing-masing. ([kominfo.go.id/protokol-komunikasi-publik](http://kominfo.go.id/protokol-komunikasi-publik))

Pesan-pesan yang disampaikan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam penanganan pandemi COVID-19 harus disampaikan dan dilaksanakan selaras dengan kebijakannya oleh semua lini di seluruh daerah, termasuk sinergi informasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sinergi informasi antara pemerintah pusat dan daerah (Pre-In-Post) dalam penanganan pandemi COVID-19. Sinergi informasi penanganan pandemi COVID-19 ini disusun dan disesuaikan dengan tahapan penanganan dari pra hingga pascapandemi dengan substansi sebagai berikut:

### **A. Pra-Pandemi Covid-19 Masuk ke Indonesia:**

1. Sinergi informasi pencegahan bahaya virus corona (COVID-19) di berbagai lini informasi.
2. Sinergi dalam membina peran serta gugus tugas pencegahan COVID-19 dari tingkat pusat hingga daerah.

3. Sinergi dalam pembangunan infrastruktur pendukung pencegahan virus COVID-19
  4. Sinergi akses yang berpotensi berbahaya dari masuknya virus COVID-19
  5. Sinergi dalam pendeteksian virus covid-19 dari semua sumber dan ahli.
- B. Selama Pandemi COVID-19
1. Sinergi informasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui komunikasi publik penanganan virus COVID-19
  2. Sinergi aksi operasional penanganan virus COVID-19
  3. Sinergi penanganan pasien COVID-19
  4. Sinergi publikasi pemberitaan perkembangan virus COVID-19
- C. Pasca Pandemi COVID-19
1. Sinergi pengkajian ulang wilayah dan infrastruktur pendukung di masa pandemi COVID-19
  2. Sinergi perhatian dan bantuan yang terdampak virus COVID-19 dengan menjamin keberlangsungan hidup mereka.
  3. Sinergi pemulihan semua sektor dari terdampak COVID-19
  4. Sinergi kebijakan baru yang saling mendukung tidak parsial.

Sinergi pemerintah melalui komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua berharap dapat melewatinya dengan baik tanpa mendengar dan melihat informasi yang disampaikan bernarasi pada unsur penilaian mental atau psikologis, namun motivasi dan optimisme yang terus dibangun dengan pesan-pesan positif. Bukan drama yang setiap hari ditonton publik karena informasinya saling bertentangan dan berubah-ubah sehingga menimbulkan kepercayaan publik.

Sinergi informasi yang ingin disampaikan melalui komunikasi publik, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menganalisis masalah yang berkembang dengan melihat beberapa contoh negara yang terkena dampak dan menyelesaikan krisis dengan satu pintu komunikasi
2. Dokumen arahan tersebut jelas memuat data, kebijakan yang ditujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dengan mengedepankan pesan-pesan kunci kerjasama antara tim percepatan penanganan COVID-19 dengan pemangku kepentingan utama yaitu Presiden.
3. Kebijakan dan arahan dari pimpinan yang mencakup arahan teknis baik terkait kesehatan maupun non kesehatan yang memuat rencana strategis yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 belum berakhir untuk tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Baik ditujukan untuk perorangan, kelompok, maupun lembaga/perusahaan yang bergerak di dalam dan di luar sektor kebutuhan pokok sehari-hari.

## SIMPULAN

Pandemi COVID-19 yang terus berkembang dengan segala perkembangannya, baik positif maupun negatif, akan menjadi pelajaran besar bagi kita, tidak hanya tindakan dari sisi kesehatan yang diperhatikan melalui penyampaian pesan yang dikomunikasikan sebagai upaya menangani pandemi COVID-19. Para pengambil kebijakan suatu negara dan daerah serta komunikator di tingkat pusat dan daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan narasi berupa kebijakan dan arahan yang optimis dan positif.

Menyikapi tahapan-tahapan yang terjadi dalam penanganan pandemi COVID-19, para komunikator utama harus saling bersinergi dalam menyampaikan informasi agar masyarakat tidak bingung dengan perbedaan atau perubahan satu sama lain, yang dapat dilakukan dengan kepercayaan masyarakat yang rendah. Pemimpin komunikasi harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk menyampaikan narasi baik dalam komunikasi, keterampilan yang baik, bahasa tubuh, gerakan wajah, postur, empati, simpati, dan bahasa dengan ucapan yang baik di samping pesan disertai petunjuk teknis untuk diterapkan dalam komunikasi. semua wilayah wilayah. di Indonesia. Baik secara individu, kelompok maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Peran dan fungsi komunikasi yang perlu dikembalikan secara sistematis, massal, dan terstruktur. Serta strategi komunikasi penanganan dengan meletakkan dasar-dasar rencana strategi nasional yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah sebagai pemilik peran utama dalam menentukan dan memutuskan suatu kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah perlu memperhatikan kemampuan komunikasi publik yang mengandung pesan-pesan konstruktif dan kepastian, dengan komunikasi yang akan dibangun akan membangun kepercayaan publik. Sehingga penanganan pandemi COVID-19 tidak hanya pemerintah dan tenaga medis yang bekerja, tetapi semua elemen bahu membahu untuk mengakhiri pandemi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Alodokter. (2020). *Virus Korona (Covid-19)*. Diakses pada 20 April 2020 pukul 22.00 WIB  
<https://www.alodokter.com/virus-corona>.
- Arni, Muhammad. (2008). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Braydenkamma. (2020). *Pengertian Sinergi Adalah Membangun dan Hubungan*. Diakses pada tanggal 20 April 2020. Pukul 21.30 WIB.  
<https://easymurahbagus.wordpress.com/2016/04/23/pengertian-sinergi-dalam-build-dan-memastikan-relationship/>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebijakan Publik
- Jimly Asshiddiqie, (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tahun 2020
- Kominfo. (2020). *Sinergi Pengelolaan Komunikasi Publik*. Diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 21.00 WIB. [https://kominfo.go.id/content/detail/6107/sinergi-pengelolaan-komunikasi-publik/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/6107/sinergi-pengelolaan-komunikasi-publik/0/berita_satker)
- \_\_\_\_\_. (2020). *Protokol Komunikasi Publik Kuatkan Solidaritas Hadapi Covid-19*. Diakses pada 03 April 2020. Pukul 21:39 WIB.  
[https://kominfo.go.id/content/detail/24937/protokol-komunikasi-publik-kuatkan-solidaritas-facing-covid-19/0/virus\\_corona](https://kominfo.go.id/content/detail/24937/protokol-komunikasi-publik-kuatkan-solidaritas-facing-covid-19/0/virus_corona).
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. (1992) *Analisis data Kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Pers UI.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan Nasional
- Ramadani, T. (2019). *Pengelolaan Komunikasi Publik*. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 11-27.
- Ratna Nuraini. (2020). *Kasus Covid-19 Pertama Masyarakat Jangan Panik*. Diakses 02 Mei 2020. Pukul 22:10 WIB. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/economy/case-covid-19-pertama-Masyarakat-jangan-panik>.
- Richard West, (2008) *Pengantar Teori Komunikasi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008
- Sendjaja, Sasa Duarsa dkk. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Wangsemukti, D. G., & Nasrullah, N. (2021). *Konstruksi Media Online Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) COVID-19 DKI Jakarta*. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 9(1), 1-12.

Wikipedia. (2020). Pemerintah Indonesia. Diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 21.32 WIB.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Government\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Government_Indonesia).

\_\_\_\_\_. (2020). Diakses pada 20 April 2020 pukul 21:46 WIB.  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemic>.